

To / Kepada Yth:

Korindo Group

POSCO International

Indonesian Presidential Staff Office / *Kantor Staf Presiden*

Chief of Police, Indonesian National Police / *Kapolri, Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Office of the Inspectorate General of the National Police / *Kantor Inspektorat Jenderal
Kepolisian Nasional*

Indonesian Corruption Eradication Commission / *Komisi Pemberantasan Korupsi*

National Human Rights Commission Indonesia / *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia*

Embassy of the Republic of Korea, Jakarta / *Kedutaan Besar Republik Korea Selatan, Jakarta*

United Nations Human Rights Council / *Dewan Hak Asasi Manusia PBB*

UN Working Group on Business and Human Rights / *Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan
HAM*

Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples / *Pelapor Khusus tentang Hak
Masyarakat Adat*

Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions / *Pelapor Khusus tentang
Eksekusi Ekstra-yudisial, Ringkas-cepat, atau Sewenang-wenang*

United Nations Development Program / *Program Pembangunan PBB*

Organisation for Economic Co-operation and Development / *Organisasi Kerjasama dan
Pembangunan Ekonomi*

Forest Stewardship Council (provides Korindo with FSC label / *pemberi label FSC kepada
Korindo*)

Sumitomo Forestry (purchaser of Korindo wood / *pembeli kayu Korindo*)

Oji Group (joint venture partner with Korindo pulpwood / *mitra usaha patungan pulpwood
Korindo*)

Bank Negara Indonesia (lender to Korindo / *pemberi pinjaman Korindo*)

Siemens Gamesa (purchaser of Korindo wind turbines / *pembeli turbin angin Korindo*)

Citigroup (lender to POSCO / *pemberi pinjaman POSCO*)

Mirae Asset Financial Group (lender to POSCO / *pemberi pinjaman POSCO*)

Credit Agricole (lender to POSCO / *pemberi pinjaman POSCO*)

The Korean National Pension Fund (investor in POSCO / *investor POSCO*)

BlackRock (Investor in POSCO / *investor POSCO*)

Friday, July 3, 2020 / Jumat, 3 Juli 2020

Re: Urgent concern for the safety of land and human rights defenders impacted by the Korindo Group and POSCO International, Indonesia.

To all concerned

We write with an urgent appeal for your immediate attention and diligence in preventing further human rights abuses associated with the operations of the Korindo Group and POSCO International.

Following the release of an [Al Jazeera documentary](#) aired on 25th June 2020, which featured testimony and a range of other disturbing evidence and allegations of wrongdoing by both Korindo and POSCO operations, we are gravely concerned for the safety of impacted communities and individuals.

The death of Papuan farmer Marius Betera (MB) on 16 May this year highlights the pattern of violence and intimidation faced by communities and individuals who voice grievances against company operations or assert their rights under the Indonesian Constitution. According to a [civil society statement](#), Marius died hours after being beaten by a policeman outside the field offices of PT Tunas Sawa Erma (Korindo Group), where he had arrived to complain against Korindo's destruction of his banana farm. [Korindo have also issued a statement](#) about the death. Since his death, community member Petrus Kinggo (PK), who has been searching for answers on the death of MB, reports being threatened by men who arrived from Korindo's company camp. PK

Perihal: Keprihatinan mendesak bagi keamanan pembela lahan dan HAM yang terdampak oleh Korindo Group dan POSCO International, Indonesia.

Kepada semua pihak yang berkepentingan

Kami menulis dengan permintaan mendesak untuk perhatian dan ijhtih segera Anda dalam mencegah semakin parahnya pelanggaran HAM terkait semua kegiatan Korindo Group dan POSCO International.

Menyusul penayangan sebuah [film dokumenter dari Al Jazeera](#) pada tanggal 25 Juni 2020, yang menampilkan kesaksian dan berbagai bukti meresahkan lainnya serta dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Korindo dan POSCO, kami sangat khawatir atas keselamatan masyarakat dan individu yang telah terdampak dari kegiatan Korindo dan POSCO.

Kematian petani Papua Marius Betera (MB) pada tanggal 16 Mei tahun ini menyoroti pola kekerasan dan intimidasi yang dihadapi oleh masyarakat dan individu yang menyuarakan keluhan mereka menolak kegiatan perusahaan atau menuntut hak-hak mereka yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut [pernyataan masyarakat sipil](#), Marius meninggal beberapa jam setelah dipukuli seorang polisi di luar kantor lapangan PT Tunas Sawa Erma (Korindo Group), dimana dia datang untuk menyampaikan keberatan terhadap Korindo atas perusakan kebun pisanginya. [Korindo juga telah mengeluarkan pernyataan](#) terkait kematian tersebut. Semenjak kematian Marius, salah satu anggota masyarakat bernama Petrus Kinggo (PK), yang telah

has also discovered that photos of him circled in red have been distributed by Whatsapp without knowing the source and motive for the distribution.

We also note and support the submission by Indonesian CSOs to a number of UN Special Rapporteurs and the Indonesian Government, urging a full and transparent investigation into Marius' death, justice and remedy for Marius' family, and demands that security services uphold people's rights instead of acting as enforcement agencies for private corporate interests.

Korindo's threat to pursue legal action against CSOs and media outlets investigating its conduct adds to its record of trying to avoid scrutiny through legal bullying.

To the Korindo Group and POSCO International: we demand respect for the human rights of all communities impacted by your operations, to ensure the safety of all stakeholders including community members, workers and CSOs, commit to full remedy for prior harms done through a transparent process involving all affected stakeholders, and fully cooperate in any investigations into alleged land and human rights abuses linked to your company group operations.

berusaha mencari jawaban atas kematian MB, melaporkan telah diancam oleh orang-orang yang datang dari camp perusahaan Korindo. PK juga menemukan foto dirinya yang dilingkari warna merah telah disebar melalui Whatsapp tanpa diketahui sumber dan motifnya.

Kami juga mencatat dan mendukung surat dari masyarakat sipil Indonesia kepada sejumlah Pelapor Khusus PBB dan Pemerintah Indonesia yang mendesak pengusutan tuntas dan transparan terkait kematian Marius, keadilan dan pemulihan untuk keluarga Marius, dan menuntut aparat keamanan menjunjung hak-hak masyarakat alih-alih bertindak sebagai lembaga penegakan untuk kepentingan korporasi swasta.

Ancaman Korindo untuk mengambil tindakan hukum terhadap OMS dan pihak media yang menginvestigasi kegiatan usahanya menambahkan catatan bahwa perusahaan tersebut terus berusaha untuk menghindari pengawasan melalui intimidasi hukum.

Kepada Korindo Group dan POSCO International: kami menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia dari semua masyarakat yang terdampak dari kegiatan-kegiatan usaha Anda, memastikan keamanan dari semua pemangku kepentingan termasuk anggota masyarakat, pekerja dan OMS, bersedia untuk melakukan pemulihan yang menyeluruh terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan melalui proses yang transparan dan melibatkan semua pemangku kepentingan terdampak, serta bersedia kerjasama untuk penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak atas tanah dan HAM yang terkait dengan perusahaan Anda.

To all public bodies with oversight or enforcement responsibilities for protecting human rights: to proactively intervene in the situation by warning Korindo, POSCO and local security services that complete restraint must be shown and that any rights violations or other retaliation measures against communities or activists will not be tolerated, and to fully investigate any allegations of land or human rights abuses.

To all organizations and companies that are enabling or profiting from Korindo and POSCO operations: to publicly announce a commitment to zero tolerance for any rights violations in supply chain or investment relationships, to undertake robust due diligence and monitoring of Korindo and POSCO operations, participate in any investigation or remedy process linked to business relationships, and to suspend relationships if acceptable standards of operation are not rapidly assured.

Kepada semua badan pengawasan publik atau organisasi yang memiliki tanggung jawab penegakkan terhadap perlindungan HAM: secara proaktif mengintervensi situasi tersebut dengan memperingatkan Korindo, POSCO dan aparat keamanan setempat bahwa mereka harus menahan diri dan setiap pelanggaran hak atau tindakan pembalasan lainnya terhadap masyarakat atau aktivis tidak akan dibiarkan, serta melakukan penyelidikan penuh terkait semua dugaan pelanggaran HAM atau hak atas tanah.

Kepada semua organisasi dan perusahaan yang melanggengkan atau mendapat keuntungan dari kegiatan Korindo dan POSCO: segera mengumumkan komitmen terhadap tidak ada toleransi bagi pelanggaran hak apa pun dalam rantai pasok atau hubungan investasi, melakukan uji tuntas yang mendalam dan pemantauan terhadap operasi Korindo dan POSCO, turut serta dalam penyelidikan atau proses pemulihan apapun yang berkaitan dengan hubungan bisnis, dan menanggukuhkan hubungan bisnis jika standar operasinya tidak dengan cepat dipastikan.

Dari / From:

- 1 Advocates for Public Interest Law and Korean Transnational Corporations (APIL)
- 2 Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP)
- 3 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
- 4 AMAN Nusa Bunga
- 5 AMAN Sorong Raya
- 6 Amazon Watch
- 7 APVVU
- 8 Asia Justice and Rights (AJAR)
- 9 awasMIFEE

- 10 BABEOSER BIKAR
- 11 Bina Rakyat Sejahtera
- 12 Biodiversity Conservation Center
- 13 Biofuelwatch
- 14 Bruno Manser Fund
- 15 Cambodian Center for Study and Development in Agriculture (CEDAC)
- 16 Dewan Adat Papua
- 17 Earthsight
- 18 EcoNexus
- 19 EJF Indonesia
- 20 ELPAGAR Kalbar
- 21 ELSAM
- 22 Environmental Investigation Agency
- 23 Environmental Paper Network
- 24 Etnika Semesta Katulistiwa
- 25 Fern
- 26 FIAN Indonesia
- 27 Forest Peoples Programme
- 28 Forest Watch Indonesia
- 29 Forum Independen Mahasiswa West Papua
- 30 Forum Ökologie & Papier
- 31 Friends of the Earth US
- 32 GARDA Papua
- 33 Genesis Bengkulu
- 34 Gita Pertiwi
- 35 Global Forest Coalition (GFC)
- 36 Global Justice Ecology Project
- 37 GRAIN
- 38 Greenpeace
- 39 HUMAN Rights NOW
- 40 Human Rights Now
- 41 Human Rights Working Group (HRWG)
- 42 ICEL
- 43 Imparsial

- 44 International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
- 45 Japan Tropical Forest Action Network(JATAN)
- 46 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
- 47 Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua
- 48 JIKALAHARI
- 49 Kaoem Telapak
- 50 Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (POKKER SHK)
- 51 Kemitraan
- 52 Komunitas Peduli Lingkungan Timika (Lepemawi)
- 53 Konfederasi Serikat Nasional
- 54 KontraS
- 55 Korea Federation for Environmental Movements / Friends of the Earth Korea
- 56 KPA Sulsel
- 57 KPA Sultra
- 58 KRuHA
- 59 LBH Banda Aceh
- 60 LBH Papua
- 61 LBH Pers
- 62 Lembaga Advokasi Perempuan Papua (eLAdPPer)
- 63 Lembaga Bentang Alam Hiau (LemBAH), Bengkayang, Kalimantan Barat
- 64 Lembaga Studi dan Advokasi HAM (ELSHAM) Papua
- 65 Lingkar Gerakan Rakyat
- 66 LPESM Riau
- 67 Mighty Earth
- 68 MTÜ Eesti Metsa Abiks (Estonian Forest Aid)
- 69 National Fisheries Solidarity Movement
- 70 National Union of Transport Equipment & Allied Industries Workers
- 71 North South Initiative
- 72 NTFP-EP
- 73 Oceanic Preservation Society
- 74 Orang Utan Republik Foundation, Inc.
- 75 Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan (OPPUK)
- 76 PADI Indonesia
- 77 PAHAM Papua

- 78 PAKATIVA Malut
- 79 PapualtuKita
- 80 Papuana Conservation
- 81 Paritas Institute
- 82 PBHR Sulteng
- 83 Perkumpulan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong
- 84 Perkumpulan Belantara Papua
- 85 Perkumpulan Panah Papua
- 86 Pesticide Action Network Asia Pacific (PANAP)
- 87 PIVOT POINT
- 88 Pro REGENWALD
- 89 Profundo
- 90 PUSAKA
- 91 PUSPAHAM SULTRA
- 92 Rainforest Action Network (RAN)
- 93 Rainforest Foundation UK
- 94 ResEARCH CENTER FOR RurAL DEVELOPMENT
- 95 Sarawak Dayak Iban Association (SADIA)
- 96 Save Our Borneo
- 97 Sawit Watch
- 98 Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP KAMe)
- 99 SERUNI
- 100 Solidaritas Perempuan
- 101 Sulteng Bergerak
- 102 TAPOL
- 103 Tiki Jaringan HAM Perempuan Papua
- 104 Trade Union Rights Centre
- 105 Transformasi untuk Keadilan INDONESIA
- 106 Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) Network
- 107 Verité Southeast Asia (VSEA)
- 108 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah
- 109 WALHI Eknas
- 110 WALHI Jabar
- 111 WALHI Jakarta

- 112 WALHI Jambi
- 113 WALHI Jateng
- 114 WALHI Kalbar
- 115 WALHI Kaltim
- 116 WALHI Maluku Utara
- 117 WALHI NTB
- 118 WALHI Papua
- 119 WALHI Sulawesi Utara
- 120 WALHI Sulsel
- 121 WALHI Sulteng
- 122 WALHI Sumsel
- 123 WALHI Yogyakarta
- 124 Water Justice and Gender
- 125 World Rainforest Movement
- 126 Yayasan Anak Dusun Papua
- 127 Yayasan Earthqualizer
- 128 Yayasan Genesis Bengkulu
- 129 Yayasan HAKA
- 130 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- 131 Yayasan Pelestari Lingkungan Hijau Kalimantan Utara
- 132 Yayasan Perlindungan Insani
- 133 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA)
- 134 Yayasan Satu Keadilan